

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2022). Perempuan korban kekerasan dan tantangan pemulihan berbasis kebijakan sosial. *Jurnal Kesejahteraan Perempuan*, 6(1), 25–39.
- Aisyah, N., & Hakim, L. (2023). Kebijakan perlindungan perempuan dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Administrasi Sosial*, 9(2), 140–154.
- Alhakim A. (2021). *Kekerasan Terhadap Perempuan : Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Batam : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1
- Amalia, R., & Pratama, A. (2022). Peran pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan korban kekerasan domestik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 98–111.
- Anggraini, D. (2021). Kebijakan responsif gender dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.
- Arifin, Z. (2023). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan berbasis layanan terpadu. *Jurnal Administrasi Publik dan Governance*, 5(2), 120–134.
- Asyiri Naufal, dkk. (2021). *Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan*. Makassar : Journal Of Gender And Children Studies Vol. 1 No. 1
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan*. Bappenas.
- Budiman, A. (2021). Implementasi kebijakan daerah dalam penanganan kekerasan berbasis gender. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(2), 87–101.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Graffindo Persada
- Buku Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2025
- Buku Kecamatan Panakkukang Dalam Angka Tahun 2025
- Buku Kecamatan Tamalate Dalam Angka Tahun 2025
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Tahun ke Tahun
- Dewi, K., & Ramadhan, M. (2024). Analisis peran DP3A dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di perkotaan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, 9(1), 33–47.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fauziah, N. (2022). Pendampingan psikososial bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 201–215.
- Firdaus, M. (2022). Kebijakan perlindungan perempuan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM Indonesia*, 3(2), 77–90.
- Fitriani, D. (2024). Responsivitas DP3A dalam layanan perlindungan perempuan korban kekerasan. *Jurnal Pelayanan Pemerintahan*, 12(1), 1–14.
- Halim, A. (2021). Sinergi kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak di daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 13(2), 89–102.

- Handayani, L. (2024). Responsivitas layanan publik dalam perlindungan perempuan korban kekerasan. *Jurnal Pelayanan Sosial*, 14(1), 1–15.
- Hapsari, T., & Widodo, J. (2022). Peran institusi lokal dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 66–79.
- Hendra, dkk. (2022). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*. Sumatera : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1
- Herlina, S., & Wahyudi, A. (2022). Perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan korban kekerasan di daerah perkotaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(3), 211–225.
- Hidayah, S., & Putra, R. (2023). Layanan pengaduan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Pelayanan Sosial Indonesia*, 8(1), 1–14.
- Ismail, T. (2024). Good governance dalam kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 6(2), 77–91.
- Kartika, P. (2023). Penguatan koordinasi kelembagaan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan*, 8(1), 55–69.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Pedoman penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak*. KemenPPPA.
- Kurniasih, Y. (2021). Kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Sosial Kontemporer*, 5(2), 145–158.
- Kurniawan, A. (2022). Peran UPTD PPA sebagai garda terdepan perlindungan perempuan. *Jurnal Pelayanan Publik*, 10(3), 189–201.
- Lembaga Administrasi Negara. (2023). *Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perlindungan kelompok rentan*. LAN RI.
- Lestari, M. (2021). Kekerasan terhadap perempuan sebagai isu pembangunan daerah. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 98–112.
- Mahendra, P., & Lestari, S. (2023). Peran aparat sipil negara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Birokrasi dan Pelayanan Publik*, 4(1), 50–64.
- Mardiah. (2021). *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya Implementasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Kalimantan : Jurnal Kajian Keluarga, Gender Dan Anak Vol.4 No. 1
- Multiwijaya, V. R., Widjajanti, E., & Purwaningsih, R. (2022). Kebijakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 4(2), 26-37.
- Mulyani, R., & Saputra, D. (2024). Pendekatan kolaboratif pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan. *Jurnal Governance Lokal*, 6(1), 20–34.
- Nasrullah, M. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan berbasis hak asasi manusia. *Jurnal HAM dan Kebijakan Publik*, 2(2), 90–104.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Nurhayati, E. (2024). Shelter perempuan sebagai ruang aman korban kekerasan berbasis gender. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 7(1), 18–32.

- Pranowo, Y. (2022). Implementasi layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 165–179.
- Prasetyo, D., & Wibowo, A. (2021). Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 113–127.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.*
- Puspitasari, D. (2021). Pendekatan berbasis korban dalam kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 6(1), 22–35.
- Putri, N. A. (2021). Kekerasan berbasis gender dan tantangan implementasi kebijakan daerah. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 213–227.
- Putriana, E. (2023). Hambatan struktural dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Sosial Politik*, 15(1), 120–134.
- Rahayu, L. (2022). Perspektif gender dalam kebijakan perlindungan perempuan di tingkat lokal. *Jurnal Studi Gender*, 9(1), 60–74.
- Rahman A. (2022). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majene : Jurnal De Facto Vol. 9 No. 1
- Rahmawati, Y., & Hidayat, R. (2023). Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Governance*, 8(2), 101–114.
- Rizky, A., & Mahmud, S. (2024). Peran aktor lokal dalam mendukung shelter perempuan korban kekerasan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, 9(1), 41–55.
- Salsabila, M. (2023). Tantangan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(2), 155–169.
- Sari, M., & Nugroho, B. (2024). Shelter warga sebagai instrumen perlindungan sosial perempuan korban kekerasan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 55–68.
- Sari, Y. (2021). Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan di wilayah perkotaan. *Jurnal Studi Sosial*, 13(2), 200–214.
- Setiawan, D. (2024). Implementasi good governance dalam kebijakan perlindungan perempuan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(2), 88–102.
- Siregar, R., & Lestari, P. (2021). Peran pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 135–149.
- daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 85–99.
- Sodah Yulius. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan : Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial*. Manado : Jurnal Sintax Idea Vol. 5 No. 11
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet

- Susiana, S. (2019). Kekerasan Seksual pada era digital. *Malang: Intelegensia Intrans Publishing*.
- Sutrisno, B. (2022). Evaluasi kebijakan perlindungan perempuan di tingkat pemerintah kota. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Publik*, 4(1), 66–80.
- Situmorang, H. (2024). Reformasi layanan publik bagi korban kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(1), 1–15.
- Sukmawati, D., & Anwar, F. (2021). Kekerasan terhadap perempuan dan respons kebijakan pemerintah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022*
- United Nations Development Programme. (2023). Local governance and gender-based violence prevention. UNDP.*
- United Nations Women. (2022). Handbook on gender-responsive services for survivors of violence. UN Women.*
- Utami, P. (2022). Penguatan kapasitas kelembagaan DP3A dalam perlindungan perempuan. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(3), 210–224.
- Utomo, H., & Prameswari, D. (2023). Pelayanan publik berperspektif gender dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Pelayanan Publik dan Gender*, 5(2), 95–109.
- Wahyuni, S. (2023). Pendekatan kolaboratif dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Governance dan Pembangunan*, 4(2), 101–115.
- Website resmi Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
- Widiyanti, T. (2024). Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem perlindungan perempuan yang berkelanjutan. *Jurnal Tata Kelola Daerah*, 7(1), 1–15.
- World Health Organization. (2021). Violence against women: Policy and programmatic responses. WHO.*
- Wulandari, S. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di tingkat lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Yuliana, R. (2022). Budaya patriarki dan hambatan penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Gender dan Sosial*, 4(2), 120–133.
- Zahir, F. I., & Saputra, S. A. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis Buku Panduan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 50-58.